

**SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA**

**(Studi terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam
Putusan Nomor : 490K/TUN/2015)**

Oleh :

HEVI DWI OKTAVIANI

E1A112015

ABSTRAK

Kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi topik dalam skripsi ini adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tentang kepengurusan partai politik. Untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan akan memutus sengketa tersebut dalam suatu putusan. Dalam suatu putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berisi argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT, Putusan Nomor: 162/B/2015/PT.TUN-JKT dan Putusan Nomor : 490K/TUN/2015 dan akibat hukum dari Putusan tingkat kasasi tersebut terhadap eksistensi kepengurusan Partai Golkar. Dalam rangka menjawab hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan disusun dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil pembahasan yaitu PTUN menyatakan Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Asas Kepastian Hukum, pada PTTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan sengketa ini bukan menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan pada tingkat kasasi Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan. Seharusnya Keputusan Objek Sengketa tetap sah karena Menteri Hukum dan HAM hanya memiliki kewenangan administratif dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, terdapat kekosongan kepengurusan Partai Golkar pasca dikeluarkannya Putusan Nomor : 490K/TUN/2015.

Kata kunci : Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara dan Pertimbangan Hukum Hakim.

**STATE ADMINISTRATION DISPUTE OF THE DECREE OF THE
MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS ON MANAGEMENT
OF GOLONGAN KARYA PARTY STATE COMMITTEE**

**(A Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number:
490K/TUN/2015)**

**By:
HEVI DWI OKTAVIANI
E1A112015**

ABSTRACT

The absolute authority of the court in the State Administrative Court are examine, decide and resolve the State Administration disputes. The state administration dispute that was the topic of this research is the effect of State Administration decision on management of political parties. To complete the State Administration dispute, the court will decide the dispute in a verdict. Before decide the verdict of the cases examined, the judges need to consider the relevance things to the case. In a decision must contain a legal considerations judge that contain arguments or reasons of the judges that were taken into consideration for the decision to be handed down by the judge. The researcher was interested in investigating the legal considerations of judges in Decision Number 62/G/2015/PTUN-JKT, Decision Number 162/B/2015/PT.TUN-JKT, Decision Number 490K/TUN/2015 and the legal effect of the decision on the existence of the Golkar's management. This is a normative juridical research with legislation approach, case approach and conceptual approach. This research used qualitative method to analyze the data. The result of the research was State administrative Court decided the Object of Dispute Decision that contradicted with the Article 33 of Law No. 2 of 2011 on Politic Party and The principle of Rule of Law, the State Administrative High Court decided that the suit could not be approved because the case was not the Absolut authority of State Administrative Court, and in Appeal the Object of Dispute Decision contradicted with Accuracy Principle. The Object of Dispute Decision should be lawful because The Minister of Law and Human Rights just have administrative authority in making any administrative decision. The Minister of Law and Human Rights just have administrative authority in making any administrative decision. Then, there was a vacuum of management in Golkar Party after the issuance of Decision Number: 490K/TUN/2015.

Keywords: Absolut Authority of State Administrative Court, Dispute Administrative and legal consideration of the judge.